

**ANALISIS ANGGARAN BERBASIS KINERJA SEBAGAI  
INSTRUMEN PENGAWASAN KEUANGAN PADA BADAN  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
(BPKD) KAB. ENREKANG**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**SRIWAHYUNI B**

**NIM 105720559715**

**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**ANALISIS ANGGARAN BERBASIS KINERJA SEBAGAI  
INSTRUMEN PENGAWASAN KEUANGAN PADA BADAN  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
(BPKD) KAB. ENREKANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Manajemen  
Disusun dan Diajukan oleh :**

**SRIWAHYUNI B**

**NIM 105720559715**



**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## MOTTO

Kesuksesan itu bukanlah suatu hal yang dapat siap dalam semalam, begitu pun ketika anda memikirkan ingin menjadi apa dan seperti siapa, maka bersiaplah menyiapkan diri menjemput sebuah kesempatan, karena kesuksesan datang disaat kesempatan dan persiapan berjumpa.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda dan Ibunda saya tercinta, Basri Dan Warni yang telah mendidik, senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Ucapan terima kasih takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan ayah dan ibu, karena itu terimalah persembahan bukti dan cintaku untuk kalian ayah dan ibu.
2. saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan ini. Terimakasih dan sayangku untuk kalian.
3. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Makassar.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Anggaran Berbasis Kinerja Sebagai Instrumen  
Pengawasan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan  
Daerah (BPKD) Kab. Enrekang

Nama Mahasiswa : Sriwahyuni E  
No Stambuk/NIM : 105720559715  
Program Studi : Manajemen  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan  
panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Makassar pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019.

Makassar, 30 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Hj. Ruliaty, MM  
NIDN: 0009095406

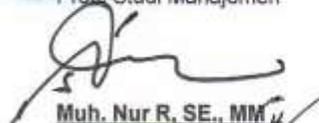
  
Dr. Hj. Arniati, SE., M.Pd  
NIDN: 0907037104

Mengetahui,

Dekan,  
Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua,  
Prodi Studi Manajemen

  
Isma. Rasulong, SE., MM  
NBM: 903078

  
Muh. Nur R., SE., MM  
NBM: 1085576



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN**  
 Jl. Sultan Alaaddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama Sriwahyuni B Nim : 105720559715, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0011/SK-Y/61201/001004/2019 M, Tanggal 29 Dzulhijjah 1440 H/ 30 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Dzulhijjah 1440 H  
 30 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)  
 (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)  
 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)  
 (Wakil Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliaty, MM (.....)  
 2. Faidul Adzlen, SE., M.Si (.....)  
 3. Linda Arisanty Razak, SE, M.Si, Ak (.....)  
 4. Nunnaya, ST., MM (.....)

Disahkan oleh,  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 Universitas Muhammadiyah Makassar  
  
**Ismail Rasulong, SE., MM**  
 NBM: 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sriwahyuni B  
Stambuk : 105720559715  
Program Studi : Manajemen  
Dengan Judul : Analisis Anggaran Berbasis Kinerja Sebagai Instrumen Pengawasan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Enrekang

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar. Dan telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019

Makassar, 30 Agustus 2019

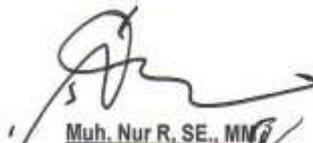
Yang membuat Pernyataan,

METERAI  
TEMPEL  
Rp134FF972115X01  
6000  
Sriwahyuni B

Diketahui Oleh :

Dekan,  
Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Unismuh Makassar  
  
Nadi Rasjlong, SE., MM  
NBM: 903078

Ketua,  
Jurusan Manajemen

  
Muh. Nur R., SE., MM  
NBM: 1085576

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmad dan Hidayah-Nya yang tiada henti di berikan kepada hambanya. Salawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul "Analisis Anggaran Berbasis Kinerja Sebagai Instrumen Pengawasan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Enrekang.". Dengan lancar

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Ayahanda dan Ibunda saya yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi kebaikan dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tabpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula ucapan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. Abd Rahman Rahim, SE. MM., Rektor Unifersitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muh Nur Rasyid, SE., MM., selaku ketua jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Ruliati, MM. Selaku pembimbing satu dan Ibu Dr. Hj. Arniati, SE.,M.Pd. selaku pembimbing dua yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Syafaruddin, SE., MM., selaku penasehat akademik yang telah mendampingi penulis selama menjalani masa perkuliahan.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Para Staf BPKD Kabupaten Enrekang tempat dimana penulis meneliti untuk tugas akhirnya.
9. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktifitas studi manajemen.
10. Semua pihak yang telah membantu selama penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya pembaca, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Wassalamu´alaikum Wr. Wb.



## ABSTRAK

**Sriwahyuni B, 2019. Analisis Anggaran Berbasis Kinerja Sebagai Instrumen Pengawasan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Ibu Ruliati dan Ibu Arniati.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis anggaran berbasis kinerja sebagai instrumen pengawasan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang periode 2014-2018. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio kemandirian dan rasio efektifitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2014-2018 pada Rasio Kemandirian masih sangat rendah yaitu di tahun 2014 sebesar 5,03 %, tahun 2015 sebesar 5,90 %, tahun 2016 sebesar 5,78 %, tahun 2017 sebesar 12,87 dan ditahun 2018 sebesar 11,90 %. Hal ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan daerah masih belum maksimal. ini dikarenakan masih relatif kurangnya pendapatan asli daerah yang dapat diterima pemerintah daerah kabupaten Enrekang untuk dapat mengurangi ketergantungan atas sumber dana ekstern. Hal ini dikarenakan masih relatif kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya. Sedangkan jika dilihat dari rata-rata rasio Efektifitas lima tahun terakhir hanya 78, 77% yang dikategorikan kurang efektif. Karena mengalami penurunan, Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Enrekang masih mengalami berbagai kendala atau kesulitan dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah, salah satunya yaitu masih tingginya beban atau biaya dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah di daerah.

Kata Kunci : Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja Keuangan.

## ABSTRACT

**Sriwahyuni B, 2019. Performance Based Budget Analysis as an instrument of financial supervision in the Enrekang district financial Management Body. Thesis of the Faculty of Economics and Business Majoring in Management, Makassar Muhammadiyah University. Guided by Mrs Ruliati and Mrs Arniati**

This study aims to determine the performance-based budget analysis as an instrument of financial oversight in the financial management body of the district of Enrekang in the 2014-2018 period. The research method used is quantitative descriptive analysis using the ratio of independence and effectiveness ratio.

The results of the study show that, financial performance in the financial management body of the Enrekang district in the 2014-2018 fiscal year the independence ratio is still very low in 2014 which was 5,03%, in 2015 it was 5,90%, in 2016 it was 5,78%, in 2017 it was 12,87%, and in 2018 it was 11,90%. This shows that the source of regional revenue is still not optimal. This is due to the relative lack of local original revenue that can be received by the Enrekang district government to be able to reduce dependence on external funding sources. This is due to the relative lack of public participation in paying taxes, levies and other fees. Whereas if seen from the average effectiveness ratio of the last five years, only 78,77% were categorized as less effective. Because it experienced a decline, this is due to the Enrekang district government still experiencing various obstacles or difficulties in realizing the target of the original local revenue, one off which is the high burden or cost in carrying out government affairs in the regional.

Keywords: performance Based Budgeting, Financial Performance

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
A. Anggaran Berbasis Kinerja.....	5
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	10
C. Kinerja Keuangan Daerah .....	14
D. Pengawasan Keuangan.....	16
E. Tinjauan Empiris .....	23
F. Kerangka Fikir .....	25

G. Hipotesis .....	26
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
C. Definisi Operasional Variabel .....	27
D. Populasi dan Sampel.....	28
E. Metode Pengumpulan data.....	28
F. Metode Analisis.....	29
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
B. Hasil Penelitian .....	39
C. Pembahasan.....	45
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.2 Laporan LRA 2014-2018.....	39
Tabel 4.3 Kriteria Kemandirian Kinerja Keuangan .....	40
Tabel 4.4 Rasio Kemandirian BPKD.....	41
Tabel 4.5 Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan .....	42
Tabel 4.6 Rasio Efektifitas BPKD .....	43



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir .....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKD .....	32



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dan peranan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik (Abdul Halim : 2007), (Rahmad Hidayat, 2015).

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan atau mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. (Muhammad Mahsun, 2013 :25). Tidak hanya kinerja yang menjadi sorotan saat ini, tetapi juga anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi.

Selain itu, sejalan dengan yang diamanatkan dalam undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang perimbangan keuangan Negara akan pula diterapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja disektor publik agar penggunaan anggaran tersebut bisa dinilai kemanfaatan dan kegunaannya oleh masyarakat. Undang-undang No. 17 tahun 2003 meenetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.

Anggaran berbasis kinerja adalah memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan

efektifitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam rangka jangka menengah (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusafi, 2012 :43). Dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja maka setiap pemerintah daerah akan diketahui kinerjanya. Kinerja ini akan tercermin pada laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan prestasi kerja suatu satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) (Sem Silahi, 2012).

Faktor lain yang turut menentukan suatu organisasi sukses dalam meningkatkan kinerja adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Mardiasmo dalam Almada (2013) menerangkan bahwa kinerja pemerintah daerah akan tercapai dengan dilaksanakannya sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah pun secara persial berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap kinerja pemerintah daerah yang di capai (Hidayat, 2015).

Oleh karena itu diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri (Bastian, 2006 : 6). Hal ini sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonomi yang mampu memyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan Daaerah (Soedjino, 2000).

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi dengan menyerahkan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini juga terjadi pada pemerintah kabupaten enrekang dan satuan kerja perangkat daerah yang ada di Kabupaten Enrekang. Pemerintah Kabupaten Enrekang Mendapatkan tugas dan wewenang sepenuhnya untuk mengatur jalannya segala urusan pemerintah dan kepentingan yang ditujukan untuk melayani masyarakat Kabupaten Enrekang.

Untuk menjalankan tugas dan wewenagngnya secara menyeluruh, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten enrekang (BPKD) menyelenggarakan pemerintahan daerah, dan kebijakan tersebut membutuhkan pendanaan dalam bentuk pendapatan. Belanja dan pembiayaan daerah. Seluruh kegiatan dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Dari uraian diatas maka penulis mengangkat judul **“Analisis Anggaran Berbasis Kinerja Sebagai Instrumen Pengawasan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Apakah anggaran berbasis kinerja sebagai instrumen pengawasan keuangan sudah berjalan efektif pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Enrekang?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah “mengetahui bagaimana proses anggaran berbasis kinerja sebagai instrumen pengawasan keuangan sudah berjalan efektif pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Enrekang”.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi instansi**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran.

#### **2. Bagi peneliti**

Penelitian ini merupakan penerapan dari ilmu ekonomi yang telah diperoleh dan proses belajar penulis sehingga menambah wawasan penulis mengenai bagaimana penerapan teori dengan praktek yang sebenarnya.

#### **3. Bagi pihak lain**

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan digunakan sebagai acuan penelitian lebih lanjut ataupun penelitian sejenis nantinya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Anggaran Berbasis Kinerja

##### 1. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan untuk masa depan dimana merupakan komponen utama dari perencanaan. Perencanaan sendiri adalah pandangan kedepan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Mardiasmo (2011:61) menjelaskan, bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Bastian (2010:164) mengemukakan, bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Menurut Nufarin (2004:12) anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Sejalan dengan pendapat di atas, Mulyadi (2001:488) dalam buku akuntansi manajemen, mengemukakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka

waktu satu tahun. Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan anggaran (*programming*).

## 2. Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja (*Performance based budgeting*) pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output. Halim (2012:177) menyatakan, bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dalam hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

Bastian (2010:171) mengemukakan, bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada “output” organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi.

## 3. Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam buku 2 pedoman penerapan Penganggaran berbasis kinerja (2009: 20), langkah-langka pokok penerapan anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Strategi
- b. Sinkronisasi
- c. Penyusunan Kerangka Acuan
- d. Perumusan/penetapan Indikator Kinerja

e. Pengukuran Kinerja

f. Pelaporan Kinerja

#### 4. Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk meningkatkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Menurut Muljarijadi (2006 : 77), beberapa manfaat yang bisa dirasakan dengan adanya pengukuran kinerja yaitu :

- a. Akuntabilitas organisasi publik kepada DPRD dan public lebih muda di lihat.
- b. Lebih memotifasi peningkatan pelayanan kepada publik.
- c. Peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah.
- d. Anggaran kinerja menekankan kepada sasaran kinerja dan pencapaian.

Anggaran berbasis kinerja yang efektif akan mengidentifikasi keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi, yang merupakan kunci pengelolaan program secara efektif. Jika terjadi perbedaan antara rencana dan realisasinya dapat dilakukan evaluasi sumber-sumber *input* dan bagaimana keterkaitan dengan *output* dan *outcome* untuk menentukan efektifitas pelaksanaan program.

#### 5. Ruang Lingkup Anggaran Berbasis Kinerja

a. Menentukan Visi dan Misi

Penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target merupakan tahap pertama yang harus ditetapkan suatu organisasi dan menjadi tujuan tertinggi yang hendak dicapai sehingga setiap indikator kinerja harus dikaitkan dengan komponen tersebut. Oleh karena itu, penentuan komponen-komponen tidak hanya ditentukan oleh pemerintah tetapi juga mengikutsertakan masyarakat sehingga dapat diperoleh informasi mengenai kebutuhan publik.

b. Menentukan Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan bermanfaat (berfungsi). Indikator kinerja meliputi:

- a) Masukan (*input*) adalah sumber daya yang digunakan dalam suatu proses untuk menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Indikator masukan meliputi dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, data dan informasi lainnya yang diperlukan.
- b) Keluaran (*output*) adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan yang telah ditetapkan. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktifitas

atau tolak ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur.

c) Hasil (*outcome*) adalah suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran. Indikator hasil adalah sasaran program yang telah ditetapkan.

d) Manfaat (*Benefit*) adalah nilai tambah dari suatu hasil yang manfaatnya akan nampak setelah beberapa waktu kemudian. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi secara optimal.

e) Dampak (*Impact*) pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan. Indikator dampak merupakan akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi, dampaknya baru terlihat setelah beberapa waktu kemudian.

#### c. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Terhadap Pemilihan dan Prioritas Program

Kegiatan ini meliputi penyusunan peringkat-peringkat alternative dan selanjutnya mengambil keputusan atas program/kegiatan yang dianggap menjadi prioritas. Dilakukannya pemilihan dan prioritas program/kegiatan mengingat sumber daya yang terbatas.

#### 6. Kinerja

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai suatu yang ingin dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan seseorang. Banyak batasan yang diberikan para ahli istilah kinerja, walaupun berbeda dalam tekanan rumusannya, namun secara prinsip kinerja adalah mengenai proses pencapaian hasil. Istilah kinerja berasal

dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). sehingga dapat didefinisikan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (A.A Anwar Prabu Mangkunegara, 2004:67).

Menurut Kusnadi (2003;64) menyatakan bahwa kinerja adalah setiap gerakan, perbuatan, pelaksanaan, kegaitan atau tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan atau target tertentu.

Hariandja (2002;195) mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi. Kinerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam usaha organisasi tersebut untuk meningkatkannya.

Sedangkan menurut (Mathis dan Jackson 2002:78) kinerja pada dasarnya adalah apa yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh karyawan. Kinerja karyawan mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi.

## **B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

### **1. Pengertian APBD**

APBD Menurut peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan peraturan Menteri nomor 59 Tahun 2007, anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah selama periode satu tahun dan menggambarkan perkiraan antara sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran. (Halim dan Kusufi : 2014).

APBD dalam pemerintah daerah berguna sebagai rencana perkiraan tertinggi biaya pemasukan dan pengeluaran anggaran dalam kegiatan dan proyek dalam periode anggaran satu tahun. Dimana didalam APBD sebagai anggaran daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Rencana, jenis dan bentuk proyek dalam bentuk angka maupun uraian dalam satu periode.
- 2) Batas minimal target dan batas maksimal target pendanaan maupun pengeluaran aktifitas.

## 2. Struktur APBD

Di era paska reformasi APBD mengalami perubahan-perubahan mendasar, yang didasarkan pada peraturan-peraturan, terutama Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintah daerah, Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang direvisi menjadi UU Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 struktur APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah (Halim,2001) dalam Yudisanta (2007).

Perkiraan Struktur APBD berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2002, tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Halim, 2001) dalam Yudisanta (2007), agar lebih jelas berikut penjelasan dari komponen-komponen struktur APBD yaitu :

#### **a. Pendapatan**

Pendapatan adalah sebuah penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktifa atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan (Halim , 2001) dalam Yudisanta (2007) sedangkan Rosjidi (2001) mengungkapkan sama halnya dengan APBN anggaran pendapatan daerah dibagi ke dalam 2 kelompok sumber penerimaan, yaitu :

1. Rencana penerimaan rutin
2. Rencana penerimaan pembangunan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan, pendapatan dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi (Yudisanta 2007).

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan

### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Rosyidi (2001) dalam Yudisinta (2007) ada satu lagi sumber-sumber penerimaan daerah yaitu pinjaman daerah. Pinjaman daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah bersumber dari pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.

#### **b. Belanja**

Belanja Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah terdiri dari (Yudisinta, 2007) yaitu :

1. Belanja Aparatur Daerah
2. Bagian Belanja Pelayanan Publik

Menurut Halim (2001) masing-masing bagian belanja tersebut dirinci menurut belanja yang meliputi :

1. Belanja Administrasi Umum (BAU)

BAU adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktifitas atau pelayanan publik (Halim, 2004).

2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan (Sarana dan Prasarana)

Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktifitas atau pelayanan publik (Halim, 2004).

3. Belanja Modal

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 (satu tahun anggaran dan akan menambah asset/kekayaan

daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Halim, 2004).

Selain ketiga belanja diatas terdapat 2 belanja lagi yaitu :

- 1) Belanja Transper merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengambilan imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok ini terdiri dari pembayaran dan angsuran pinjaman, dana bantuan dan dana cadangan.
- 2) Belanja Tak Tersangka merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membayar kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

### c. Pembiayaan

Pembiayaan menurut peraturan menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan, dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, pembiayaan ini antara lain yaitu :

1. Penerimaan Daerah
2. Pengeluaran Daerah

## C. Kinerja Keuangan Daerah

### 1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian semua hasil kerja atau pengelolaan di bidang keuangan yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan oleh kebijakan atau perundang-undangan yang diukur selama periode anggaran.

Kinerja keuangan merupakan pencapaian semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang dapat dijadikan kekayaan daerah dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat pengawasan serta evaluasi organisasi. Langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

## 2. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim (2004) analisis keuangan adalah mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam rangka mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan analisis rasio terhadap APBD. Beberapa rasio yang dapat digunakan antara lain :

### 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Widodo (Halim, 2004 : 284) kemandirian keuangan daerah atau otonomi fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah.

Formula yang digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

## 2) Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Widodo (Halim, 2004: 258) rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Formula yang digunakan untuk mengukur efektifitas keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

## D. Pengawasan Keuangan

### 1. Pengertian Pengawasan

Siagian (2005:13), menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan kepala (pimpinan) yang mengusahakan pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan hasil yang dikehendaki.

George. R (2006:395), dengan tegas mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi potensi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Keuangan merupakan unsur administrasi yang menyangkut tentang masalah pembiayaan dalam suatu kerja, yaitu yang berkenaan dengan penataan dan pengelolaan segi-segi pembiayaan, yang meliputi sumber-sumber biaya, cara memperoleh dan menggunakannya, kesemuanya itu merupakan fungsi keuangan.

Ridwan dan Inge (2013), keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah.

## 2. Pengertian Pengawasan Keuangan

Secara umum, yang dimaksud dengan pengawasan keuangan adalah segala kegiatan dan tindakan keuangan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan dalam hal keuangan tidak menyimpang dari tujuan dan rencana yang telah digariskan. Karena pihak yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan keuangan ini adalah pihak atasan, maka pengawasan keuangan sesungguhnya mencakup baik aspek pengendalian maupun aspek pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak atasan maupun bawahan.

Sementara dalam bukunya Maman Ukas (2004:337), menyatakan bahwa pengawasan keuangan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan keuangan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11), yang mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan keuangan adalah keseluruhan dari pada kegiatan keuangan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan menurut Kadarman (2001:159), pengawasan keuangan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintah.

Lebih lanjut Sujamto (dikutip Silalahi, 2002:177), tegas mengatakan pengawasan keuangan adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai pula dengan segala ketantuan dan kebijakan yang berlaku.

Kesimpulan dari beberapa definisi di atas adalah bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan perencanaan untuk mengawasi atau merancang karyawan yang bekerja disebua lembaga pemerintah yang telah menetapkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan oleh pimpinan didalam kegiatan dan menetapkan suatu hasil yang diinginkan.

### 3. Fungsi Pengawasan Keuangan

Baridwan (2005:52), menyatakan bahwa fungsi pengawasan keuangan yaitu:

- a. Untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyelewengan keuangan yang dapat dilakukan dalam suatu organisasi.
- b. Untuk penentuan batas-batas mutlak suatu pekerjaan mana yang harus dikerjakan dan mana yang merupakan pelanggaran.
- c. Memberi keyakinan terhadap catatan keuangan dan transaksi.
- d. Mewujudkan keadaan-keadaan yang luar biasa. Ini nampak dalam pembuatan laporan bilamana terjadi penyelewengan dari standar kerja yang telah diketahui.
- e. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan operasional supaya berjalan lancar, efektif dan efisien.
- f. Membantu manajemen dalam memberi penilaian atas hasil pelaksanaan operasional, membuat peramal atau dugaan serta membantu dalam hal pengambilan keputusan, sebagaimana telah diketahui bahwa fungsi pengawasan keuangan sangat luas, baik administrative maupun akutansi, tetapi bukan berarti tidak ada lagi peluang bagi orang-orang tertentu pada suatu organisasi untuk melakukan kecurangan atau penyelewengan serta kesalahan. Dengan adanya pengawasan keuangan pelaksanaan kegiatan penyelewengan atau kecurangan serta kesalahan yang merugikan bisa dikurangi atau diminimalisir. Fungsi pengawasan keuangan adalah suatu sistimatis untuk menetapkan standar kegiatan dengan tujuan perencanaan menyusun sistem informasi umpan balik membandingkan kegiatan yang dilakukan

dengan standar, menentukan serta mengukur penyimpangan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber dipergunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 4 (empat) langkah pokok yang terkandung dalam fungsi pengawasan keuangan, yaitu:

a) Penentuan standar dan metode pengukuran kegiatan

Seperti penentuan target penyelesaian tugas pada proses pembayaran, pencatatan, dan sebagainya.

b) Mengukur kegiatan yang dilakukan

Ini tergantung dari jenis kegiatan yang diukur atau standar yang ditentukan

c) Membandingkan antara kegiatan dengan standar-standar dan menginterpretasikan penyimpangan bila ada.

d) Melakukan tindakan koreksi

4. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilakukan dalam melakukan suatu pekerjaan tentunya memiliki tujuan tertentu, menurut Wardoyo (1986) dalam Hendra (2011), tujuan pengawasan adalah:

a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu atau yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan asas yang telah ditetapkan.

b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan secara efektif dan efisien.

c) Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana semula.

- d) Untuk mencari jalan keluar apabila ternyata ada ditemui kesulitan dan kegagalan kearah perbaikan.

#### 5. Jenis Pengawasan

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

##### a) Pengawasan Intern dan Eksteren

**Pengawasan intern** adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian dalam Negri. **Pengawasan eksteren** adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasann yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah badan pemeriksaan Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi Negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya diantara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan Negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara objektif aktivitas pemerintah.

b) Pengawasan Preventif dan Represif

**Pengawasan preventif** lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan Negara yang akan membebankan dan merugikan Negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Di sisi lain, **pengawasan represif** adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Selain itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan ada atau terjadinya penyimpangan.

c) Pengawasan Aktif dan Pasif

**Pengawasan dekat (aktif)** dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formal menurut hak (*rechmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran

apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. Sementara hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*). Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya resiko korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran Negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri. Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan Negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

#### **E. Tinjauan Empiris**

Terbitnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 yang menetapkan bahwa APBD harus disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja membuat SKPD sebagai unit pengguna anggaran dituntut untuk dapat mengajukan rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang benar-benar baik, artinya sesuai dengan kebutuhan, ekonomis, efisien, dan efektif.

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya Mandang Gabriel Anton Jentje j. Tinangon, Inggriani elim (2016) telah melakukan penelitian yang berjudul "Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja untuk Menunjang Akuntabilitas Publik pada Badan Lingkungan hidup kota Manado". penelitian tersebut menemukan bahwa Badan Lingkungan

Hidup kota Manado telah melakukan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang bertujuan untuk menunjang akuntabilitas publik secara baik dan benar sesuai dengan UU No.17 tahun 2003.

Taufik Kurrohman (2013) melakukan penelitian tentang “Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis Value For Money di Kabupaten Di Jawa Timur”. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah daerah lebih ekonomis dan efisiensi dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan anggaran berbasis kinerja.

Muh. Irfan, Budi Santoso, Lukman Effendi (2016) telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Impormasi, penekanan anggaran dan komitmen Organisasional sebagai Variabel Pemoderasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap anggaran kendur. Penelitian ini dapat membuktikan adanya interaksi dengan anggaran asimetri informasi partisipasi, penekanan anggaran memiliki efek negatif yang signifikan, sedangkan organisasi komitmen secara signifikan mempengaruhi kelonggaran anggaran.

Komeng Sri Endayani, Made Pradana Adiputra, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) yang meliputi tentang “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Febrina Astria Verasvera (2016) telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah

Daerah” metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif metode dengan pendekatan studi kasus, dan pengujian hipotesis menggunakan Rank Spearman Analisis Korelasi untuk mengetahui variabel korelasi X (Budgeting based Kinerja) dan Variabel Y (Kinerja Aparatur Daerah).

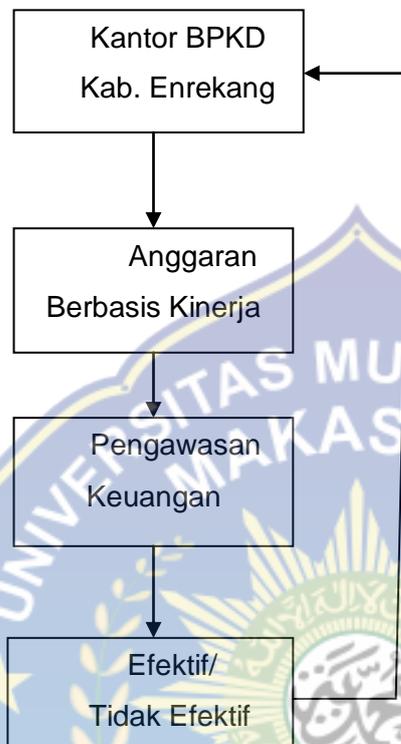
#### **F. Kerangka Fikir**

Anggaran merupakan rencana keuangan untuk masa depan dimana merupakan komponen utama dari perencanaan. Perencanaan sendiri adalah pandangan kedepan untuk menilai tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Supriyono (2001:62) “anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun”. Anggaran disusun oleh manajemen untuk jangka waktu satu tahun bertujuan untuk membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya tertentu yang diperhitungkan.

Menurut Sujamto (dikutip Silalahi, 2002:177), tegas mengatakan pengawasan keuangan adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai pula dengan segala ketantuan dan kebijakan yang berlaku.

Untuk memperjelas uraian di atas maka dibuat suatu kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Fikir**

### G. Hipotesis

Dalam kaitanya dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penulis memberikan hipotesis “Diduga bahwa anggaran berbasis kinerja sebagai instrumen pengawasan keuangan telah efektif pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Enrekang”.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian berbebtuk deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang tujuannya yaitu untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistimatis, faktua, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara penomena yang di selidiki.

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis anggaran berbasis kinerja sebagai instrument pengawasan keuangan pada BPKD Kabupaten Enrekang yang diukur melalau rasio kemandirian daerah dan rasio efektifitas, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran periode 2014-2018.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh penulis adalah di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Enrekang yang berlokasi di kota Enrekang. Waktu penelitian selama kurang lebih 2 bulan, yaitu bulan Mei-Juli 2019.

#### **C. Definisi Operasional Variabel**

Adapun definisi variabel yang akan digunakan dalam pembahasan judul ini sebagai berikut :

1. Anggaran Berbasis Kinerja yaitu sistem penganggaran yang berorientasi pada output dan berkaitan erat dengan visi, misi dan rencana kerja untuk

mengaitkan setiap pendanaan dalam kegiatan keluaran dan hasil yang di harapkan.

2. Pengawasan Keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan untuk mengawaaasi karyawan yang bekerja disebua lembaga pemerintah yang telah menetapkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan dalam suatu kegiatan.
3. Efektif yaitu pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

#### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan berupa Laporan Ralisasi Anggaran (LRA) periode 2014-2018 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan bahan yang di perlukan dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, merupakan pengamatan secara langsung pada keadaan yang sebenarnya di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung secara lisan kepada pimpinan atau staff yang berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang.

3. Dokumentasi, dalam hal ini penulis mengumpulkan data sekunder melalui pengambilan data yang ada di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang

#### F. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2004 : 284)

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2004 : 258)

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat BPKD**

Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Enrekang berdasarkan Undang-undang 22 Tahun 1999 di dukung oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah Kabupaten Enrekang dengan kewenangan membentuk beberapa lembaga pemerintah Kabupaten Enrekang sesuai dengan kebutuhannya.

Penyelenggaraan pemerintah diperlukan adanya perubahan selain merupakan tuntutan yang mengharuskan pemerintah yang lebih responsive, transparansi dan akuntabel juga dipengaruhi oleh beberapa fenomena dan desakan kebutuhan seiring dengan perkembangan dinamika pelayanan publik dalam upaya mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat serta upaya mengoptimalkan kinerja pemerintah di daerah.

Salah satu lembaga pemerintah Kabupaten Enrekang di bentuk berdasarkan peraturan daerah antara lain adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang yang pembentukan melalui peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 05 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Enrekang. Lembaga ini berkedudukan sebagai salah satu perangkat daerah otonomi Kabupaten Enrekang dituntut adanya peneglolaan keuangan daerah lebih maksimal sehingga diperlukan

menyusun rencana strategi dalam rangka perencanaan standar pelayanan minimal.

Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Enrekang melalui Sekertaris Daerah. Untuk kelancaran penyelenggaraan berdaya guna dan berhasil, maka perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dengan keputusan Bupati Enrekang.

## **2. Visi dan Misi BPKD**

### **1. Visi**

Terwujudnya pengelola keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, transparansi dan akuntabel untuk gerakan membangun Enrekang maju, aman dan sejahterah.

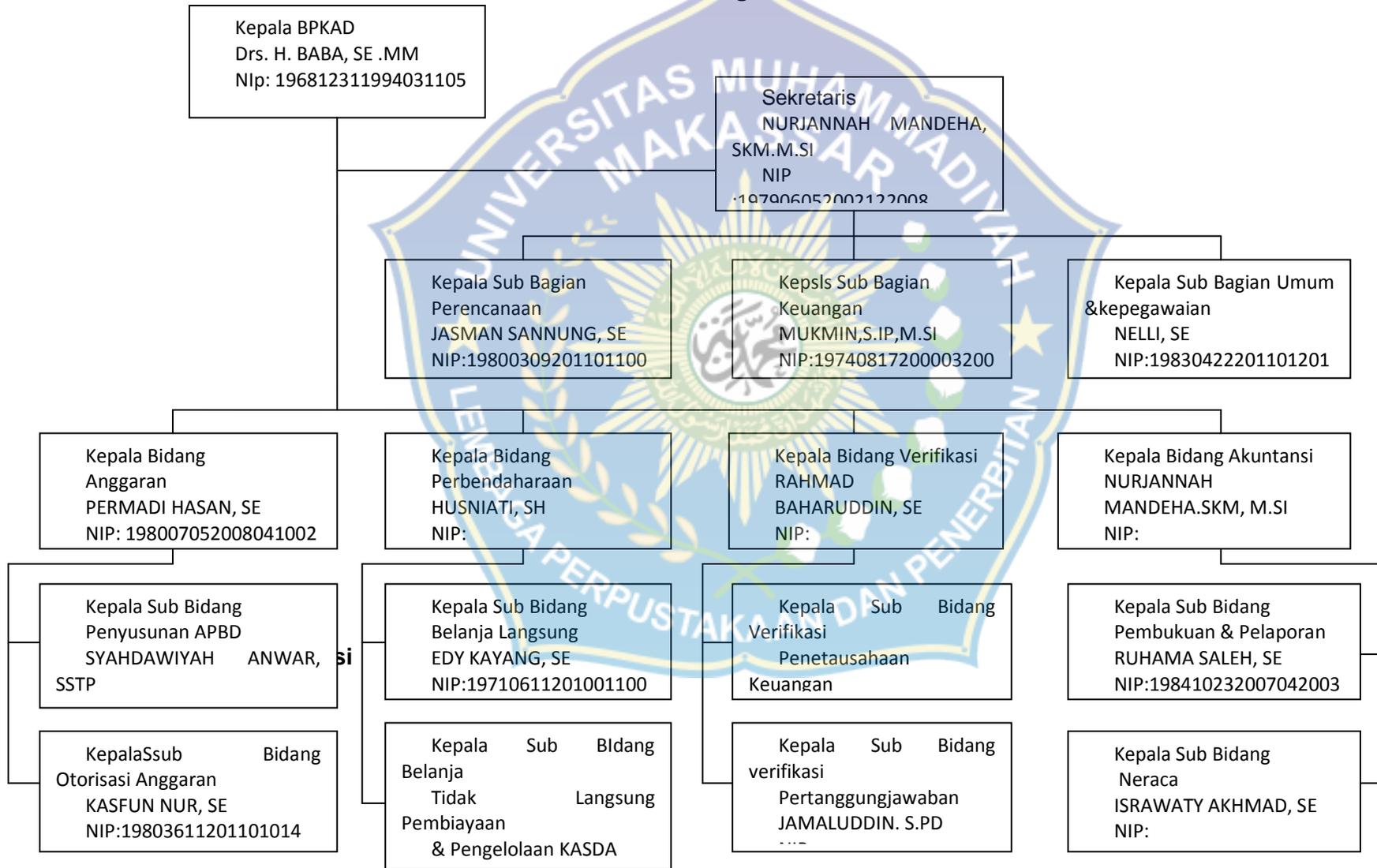
### **2. Misi**

- a. Mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah berdasarkan potnsi yang dimiliki.
- b. Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya agar aparaturn penatausahaan pengelolaan keuangan dan asset daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

### 3. Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BPKD



## 1. Kepala BPKD

Merumuskan kebijakan di bidang keuangan dan asset dan penyelenggaraan pelayanan sesuai bidang tugasnya.

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajar tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD.
- e. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
- f. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- g. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
- h. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- i. Menyusun anggaran satuan kerja BPKAD.
- j. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
- k. Melaksanakan anggran satuan kerja BPKAD.
- l. Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak.
- m. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja BPKAD.
- n. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja BPKAD.
- o. Menyusun laporan keuangan BPKAD.
- p. Menentukan potensi dan jenis sumber penerimaan daerah.
- q. Menyetujui rancangan anggaran BPKAD.

- r. Menjadi tim amnggaran ekektuf yang bertanggung jawab utama terhadap besarnya persetujuan unit kerja.
- s. Menyetujui setiap penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ktentuan yang berlaku.

## 2. Sekretaris

Menatausahakan seluruh kegiatan operasional dinas pengelola keuangan dan asset daerah.

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan oleh atasan.
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Mengkoordinasikan RKA dan DPD dalam lingkup DPKAD kepada pemimpin.
- e. Mengevaluasi terhadap rencana kebutuhan perlengkapan, dan anggaran dalam lingkup DPKAD baik pembelanjannya, penggunaannya, pembukuannya dan pelaporan.
- f. Menjamin bahwa seluruh perlengkapan dank as operasional DPKAD dari pencurian atau kehilangan.
- g. Menyetujui konsep surat menyurat, surat keputusan dan surat tugas dari pejabat dalam lingkup BPKD.
- h. Mempelajari menjelaskan setiap ketentuan yang berkaitan dengan kepegawaian, khususnya yang terkait dengan DPKAD dan mengusulkan untuk diterapkan.
- i. Menjamin pengadministrasian data-data kepegawaian dalam lingkup DPKAD.

- j. Memberikan pelayanan teknis terhadap bidang dilingkup DPKAD dalam pelaksanaan.
- k. Mengevaluasi hasil analisis jabatan dalam lingkungan DPKAD.
- l. Membantu mempercepat pengurusan kepegawaian bagi pegawai DPKAD.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diperintahkan atasannya.

### 3. Kepala Bidang Anggaran

Menyampaikan arah dan kebijakan umum APBD kepada setiap satuan kerja, mengkoordinasikan penyusunan RKA dan perubahannya oleh tim anggaran eksekutif, mempersiapkan RAPBD dan melakukan revisi APBD sesuai persetujuan DPRD serta menyusun DPA.

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan.
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Memeriksa dan meneliti bahan, data dan informasi untuk setiap unit kerja dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (RKA) dan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA).
- e. Menjamin kebenaran bahan, data dan informasi dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), perubahan APBD dan nota keuangan.
- f. Memerintahkan dan melakukan perubahan RKA setiap unit kerja keputusan panitia anggaran eksekutif.

- g. Mempersiapkan bahan, data dan informasi untuk setiap unit kerja dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pengguna anggaran satuan kerja (DPA).
  - h. Mempersiapkan bahan, data dan informasi dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) perubahan APBD dan nota keuangan.
  - i. Mencatat RKA yang diajukan oleh setiap unit kerja.
  - j. Mencatat perubahan RKA setiap unit kerja yang dilakukan oleh panitia anggaran eksekutif.
  - k. Membantu setiap unit kerja menyusun RKA dan DPd.
  - l. Memeriksa kesesuaian antara jumlah dan jenis penerimaan dan pengeluaran dengan DPA.
  - m. Membuat SPD.
  - n. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
  - o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
  - p. Melaksanakan tugas keninasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Kepala Bidang Bendahara
- Melakukan pembayaran, mencatat dan melaporkan setiap pengeluaran yang telah diverifikasi dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.
- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas.
  - b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan.
  - c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

- d. Mengeluarkan dan membukukan setiap pengeluaran kas daerah setelah diverifikasi dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.
- e. Membuat daftar penguji dan SP2D.
- f. Bersama sub bidang akuntansi melakukan rekonsolidasi pencocokan saldo kas secara berkala antara saldo kas fisik dengan saldo kas menurut pembukuan.
- g. Memeriksa setiap surat keputusan berkaitan dengan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tunjangan structural dan fungsional, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, sistem honorarium, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan penggajian dan honorarium.
- h. Memyusun daftar gaji, honorarium, dan pajak penghasilan perorangan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- i. Membuat daftar kekurangan gaji, tunjangan, dan uang duka sesuai aturan yang berlaku.
- j. Membuat SP2D gaji.
- k. Membuat SKPP pindah dan SKPP pensiun setiap pegawai.
- l. Membuat keterangan pemungutan pajak perorangan kepada setiap pegawai pada setiap akhir tahun.
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- n. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
- o. Membantu lelaahan staf kepada atasan.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas.

##### 5. Kepala Bidang Verifikasi

Memverifikasi penerimaan dan pengeluaran unit kerja sesuai DPA dan ketentuan yang berlaku.

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan.
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran beserta kelengkapannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- e. Memeriksa kesesuaian antara jumlah dan jenis penerimaan dan pengeluaran dengan DPA.
- f. Memeriksa dan mengevaluasi pembukuan transaksi keuangan yang telah diverifikasi kedalam buku jurnal, buku besar dan buku pembantu.
- g. Memeriksa dan menyetujui konsep laporan keuangan dan perhitungan APBD.
- h. Menyiapkan informasi keuangan sesuai dengan kebutuhan atasan.
- i. Membantu kelancaran pemeriksaan keuangan sesuai kebutuhan atasan.
- j. Membantu kelancaran pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh badan atau lembaga pemeriksa internal dan eksternal.
- k. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya..
- l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas.
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

## 6. Kepala Bidang Akuntansi

Melaksanakan pembkuan setiap penerimaan dan pengeluaran yang telah diotorisasi dengan menggunakan sistem pembukuan sesuai ketentuan dan membuat laporan keuangan dan laporan perhitungan APBD dalam satu tahun anggaran.

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan.
- c. Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Membukukan transaksi keuangan yang telah diverifikasi kedalam buku jurnal, buku besar dan buku pembantu.
- e. Mempersiapkan semua bukti keuangan termasuk penerimaan dan pengeluaran kas sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Menyusun konsep laporan keuangan dan laporan perhitungan APBD.
- g. Bersama bendaharawan umum daerah melakukan rekonsiliasi terhadap transaksi keuangan daerah.
- h. Menyiapkan informasi keuangan sesuai kebutuhan atasan.
- i. Menyiapkan data dan informasi keuangan kepada badan atau lembaga pemeriksa internal dan eksternal.
- j. Menilai kinerja unit kerjanya dan seluruh stafnya.
- k. Membuat telaahan staf kepada atasan.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan untuk mendorong kelancaran tugas.
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Analisis Kinerja Keuangan

Table 4.2.

#### Laporan Realisasi Anggaran periode 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	<b>PENDAPATAN</b>					
1	Pendapatan Asli Daerah	37,641,158,76 6.00	55,857,486,75 4.00	63,863,375,38 5.00	136,152,091,58 2.00	129,615,126,86 7.00
2	Pendapatan Transfer	709,220,409,3 26.00	885,039,847,8 51.00	1,037,274,320, 323.00	915,230,706,61 3.00	925,308,150,68 5.00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	385,448,000.0 0	5,750,716,000. 00	2,849,022,542. 00	6,336,630,000.0 0	34,000,000,000. 00
	<b>BELANJA</b>					
1	Belanja Operasi	557,556,524,7 20.00	662,849,722,6 28.00	707,040,121,1 37.00	707,508,330,45 8.00	717,941,985,57 5.00
2	Belanja Modal	144,844,630,1 50.00	323,990,191,0 974.00	402,667,852,3 24.00	239,221,872,31 8.00	212,301,479,61 4.00
3	Belanja Tak Terduga	1,900,000,000. 00	750,000,000.0 0	750,000,000.0 0	250,000,000.00 00	750,000,000.00 00
4	Transper	16,195,000,00 0.00	48,294,815,80 0.00	95,697,305,26 5.00	147,661,783,40 0.00	155,290,547,10 0.00
	<b>PEMBIAYAAN</b>					
1	Penerimaan pembiayaan	26,161,663,06 6.00	100,038,475,7 71.00	114,316,060,8 62.00	49,322,557,981. 00	7.250,734,737.0 0
	<b>PENGELUARAN</b>					
1	Pengeluaran Pembiayaan	36,474,119,08 8.00	10,801,795,97 4.00	12,147,500,38 6.00	12,400,000,000. 00	9,890,000,000.0 0

Analisis kinerja keuangan pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dalam penelitian ini yaitu suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten enrekang dalam bidang keuangan untuk priode 2014-2018. Rasio yang digunakan adalah rasio kemandirian dan rasio efektifitas. Adapun hasil dari analisis rasio tersebut yaitu:

#### 1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian yaitu rasio yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern, semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 4.3**

#### **Kriteria kemandirian kinerja keuangan**

<b>Kemampuan keuangan</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola hubungan</b>
Rendah sekali	0%-25%	<i>Instruktif</i>
Rendah	25%-50%	<i>Konsultatif</i>
Sedang	50%-75%	<i>Partisipatif</i>
Tinggi	75%-100%	<i>Delegatif</i>

berikut adalah acuan untuk melihat tingkat rasio kemandirian keuangan daerah yang terdiri dalam empat pola hubungan yaitu :

1. Pola hubungan instruktif, yaitu peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu peran pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. (Halim, 2014:188).

Rasio kemandirian daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2014- 2018 yaitu :

a. Rasio Kemandirian tahun anggaran 2014

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{37,641,158,766.00}{747,247,016,092.00} \times 100\% \\ &= 5,03\% \end{aligned}$$

b. Rasio Kemandirian tahun anggaran 2015

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{55,857,486,754.00}{949,648,050,605.00} \times 100\% \\ &= 5,90\% \end{aligned}$$

c. Rasio Kemandirian tahun anggaran 2016

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{63,863,375,385.00}{1,103,986,718,250.00} \times 100\% \\ &= 5,78\% \end{aligned}$$

## d. Rasio Kemandirian tahun anggaran 2017

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{136,152,091,582.00}{1,057,719,428,195.00} \times 100\% \\ &= 12,87\% \end{aligned}$$

## e. Rasio Kemandirian tahun anggaran 2018

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{129,615,126,876.00}{1,088,923,277,552.00} \times 100\% \\ &= 11,90\% \end{aligned}$$

**Table 4.4**  
**Rasio kemandirian BPKD Kabupaten Enrekang periode 2014-2018**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah	Rasio Kemandirian	Kriteria
2014	37,641,158,766.00	747,247,016,092.00	5,03 %	Rendah Sekali
2015	55,857,486,754.00	949,648,050,605.00	5,90 %	Rendah Sekali
2016	63,863,375,385.00	1,103,986,718,250.00	5,78 %	Rendah Sekali
2017	136,152,091,582.00	1,057,719,428,195.00	12,87 %	Rendah Sekali
2018	129,615,126,876.00	1,088,923,277,552.00	11,90 %	Rendah Sekali
Jumlah rata-rata			8,3 %	Rendah Sekali

Berdasarkan table 4.4 dapat diketahui bahwa Rasio Kemandirian keuangan pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dari tahun 2014-2018 masih sangat rendah yaitu rasio kemandirian di tahun 2014 sebesar 5,03%, tahun 2015 sebesar 5,90%, tahun 2016 sebesar 5,78%,

tahun 2017 sebesar 12,87% dan ditahun 2018 sebesar 11,90%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan daerah masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih relatif kurangnya pendapatan asli daerah yang dapat diterima pemerintah daerah kabupaten Enrekang untuk dapat mengurangi ketergantungan atas sumber dana ekstern.

## 2. Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Table 4.5**

### **Kriteria Efektifitas kinerja Keuangan**

<b>Persentase kinerja Keuangan</b>	<b>Kriteria</b>
Di atas 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
Dibawa 75	Tidak Efektif

Berdasarkan analisis Rasio Efektifitas yang diuraikan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian 100%, maka pendapatan dikatakan efektif.

3. Jika hasil pencapaian antara 90%-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian 75%-89%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawa 75%, maka pendapatan dikatakan tidak efektif.

Rasio efektifitas daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2014-2018:

- a. Rasio efektifitas tahun anggaran 2014

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas} &= \frac{\text{Raelisais Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{34,997,091,444.63}{37,641,158,766.00} \times 100\% \\ &= 92,98\% \end{aligned}$$

- b. Rasio efektifitas tahun anggaran 2015

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas} &= \frac{\text{Raelisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{49,214,800,279.44}{55,857,486,754.00} \times 100\% \\ &= 88,11\% \end{aligned}$$

- c. Rasio efektifitas tahun anggaran 2016

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas} &= \frac{\text{Raelisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{56,383,446,988.95}{63,863,375,385.00} \times 100\% \\ &= 88,29\% \end{aligned}$$

## d. Rasio efektifitas tahun anggaran 2017

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas} &= \frac{\text{Raelisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{100,114,214,718.55}{136,152,091,582.00} \times 100\% \\ &= 73,53\% \end{aligned}$$

## e. Rasio efektifitas tahun anggaran 2018

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas} &= \frac{\text{Raelisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{66,043,333,304.23}{129,615,126,867.00} \times 100\% \\ &= 50,95\% \end{aligned}$$

Table 4.6

**Rasio Efektifitas BPKD Kabupaten Enrekang periode 2014-  
2018**

Tahun	Realisasi penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektifitas	Kriteria
2014	34,997,091,444.63	37,641,158,766.00	92,98%	Cukup Efektif
2015	49,214,800,279.44	55,857,486,754.00	88,11%	Kurang Efektif
2016	56,383,446,988.95	63,863,375,385.00	88,29%	Kurang Efektif
2017	100,114,214,718.55	136,152,091,582.00	73,53%	Tidak Efektif
2018	66,043,333,304.23	129,615,126,867.00	50,95%	Tidak Efektif
<b>Jumlah rata-rata</b>			<b>78.77%</b>	<b>Kurang Efektif</b>

hasil dari rasio efektifitas Badan Pengelola Keuangan daerah Kabupaten enrekang tahun anggaran 2014, anggaran pendapatan daerah sebesar Rp. 37,641,158,766.00 dan realisasi pendapatan sebesar Rp. 34,997,091,444.63. selisi antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 2,644,067,321.37. dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebesar 92,98% dapat dikategorikan cukup efektif karena dibawa 100%.

Pada tahun 2015, anggaran pendapatan sebesar Rp. 55,857,486,754.00 dan raelisasi pendapatan sebesar Rp. 49,214, 800,279,44. selisi anggaran dan realisasi sebesar Rp. 6,642,686,474.56. dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebesar 88,11%. Dapat dikategorikan kurang efektif karena dibawa 100%.

Pada tahun 2016, anggaran pendapatan sebesar Rp. 63,863,375,385.00 dan realisasi pendapatan sebesar Rp. 56,383,446,988.95. selisi anggaran dan realisasi sebesar Rp. 7,479,928,396.05. dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebesar 88,29%. Dapat dikategorikan kurang efektif karena dibawa 100%.

Pada tahun 2017, anggaran pendapatan sebesar Rp. 136,152,091,582.00 dan raelisasi pendapatan sebesar Rp. 100,114,214,718.55. selisi anggaran dan realisasi sebesar Rp. 36,037,876,863.45. dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebesar 73,53%. Dapat dikategorikan tidak efektif karena dibawa 100%.

Pada tahun 2018, anggaran pendapatan sebesar Rp. 129,615,126,867.00 dan raelisasi pendapatan sebesar Rp. 66,043,333,304.23. selisi anggaran dan realisasi sebesar Rp. 63,571,793,563.

dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebesar 50,95%. Dapat dikategorikan tidak efektif karena dibawa 100%.

### C. Pembahasan

Penganggaran dengan pendekatan kinerja berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktifitas. Efisiensi yaitu sejauh mana perbandingan tingkat keluaran suatu kegiatan dengan masukan yang digunakan. Anggaran tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, tetapi juga didasarkan pada rencana tertentu yang pelaksanaannya disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. Tolak ukur keberhasilan anggaran terletak pada prestasi hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membuat suatu sistem penganggaran dan memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.

Laporan realisasi anggaran BPKD Kabupaten Enrekang merupakan laporan yang menyajikan ihtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/pemerintah kota Enrekang, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran pemerintah. Hal ini menunjukkan tingkat tercapainya target yang telah disepakati.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2014-2018, dilihat dari rasio kemandirian keuangan Berdasarkan

table 4.4 masih sangat rendah yaitu rasio kemandirian di tahun 2014 sebesar 5,03%, tahun 2015 sebesar 5,90%, tahun 2016 sebesar 5,78%, tahun 2017 sebesar 12,87% dan ditahun 2018 sebesar 11,90%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan daerah masi belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih relatif kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain-lain), pendapatan retribusi (retribusi jasa umum, retribusi perisinan, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pasar), dan pungutan lainnya (pendapatan hibah). Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, retribusi daerah dan pungutan lainnya disebabkan karena masyarakat tidak taat pada UU perpajakan, kurang percaya pada aparat perpajakan, kemudian ada masyarakat yang masih mencoba-coba bayar pajak, dan banyak masyarakat yang belum paham, uang pajak di pakai untuk apa. Jadi semestinya pemerintah melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat mengerti tentang wajib pajak dan sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak. Dengan demikian masyarakat dapat menikmati manfaatnya melalui fasilitas umum dan infrastruktur seperti (jalan, jembatan dan lain-lain), pertahanan dan keamanan seperti (bangunan, senjata, dan perumahan), subdidi pangan dan bahan bakar minyak, pengembangan alat transportasi dan lain-lainnya. Sedangkan jika dilihat dari rasio efektifitas tahun anggaran 2014-2018 yang mengalami penurunan, hal ini menggambarkan bahwa kinerja pencapaian target PAD belum maksimal karena disebabkan ketidaktepatan dalam menetapkan target penerimaan PAD, berdasarkan table 4.6 dimana tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan

target anggaran pemerintah, sehingga nilai rata-rata efektifitas lima tahun terakhir hanya 78.77% yang dikategorika kurang efektif karena dibawa 100%.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa tingkat efektifitas anggaran berbasis kinerja sebagai instrument pengawasan keuangan pada BPKD Kabupaten Enrekang masih kurang efektif. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Enrekang masih mengalami berbagai kendala atau kesulitan dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah, salah satunya yaitu masih tinggihnya beban atau biaya dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah di daerah, masih relatif kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya. Diharapkan pada tahun yang akan datang kinerja keuangan pada BPKD Kabupaten Enrekang meningkat agar dapat tercapai tujuan yang di harapkan bersama.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Anggaran Berbasis Kinerja sebagai Instrumen Pengawasan Keuangan Pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang yang telah dibahas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dari rasio kemandirian keuangan pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang dari tahun 2014-2018 masih sangat rendah yaitu rasio kemandirian di tahun 2014 sebesar 5,03%, tahun 2015 sebesar 5,90%, tahun 2016 sebesar 5,78%, tahun 2017 sebesar 12,87 dan ditahun 2018 sebesar 11,90%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan daerah masi belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih relatif kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.
2. hasil dari rasio efektifitas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2014, anggaran pendapatan daerah sebesar Rp. 37,641,158,766.00 dan realisasi pendapatan sebesar Rp. 34,997,091,444.63. selisi antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 2,644,067,321.37. dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebesar 92,98%. dapat dikategorikan cukup efektif karena dibawa 100%. Pada tahun 2015, anggaran pendapatan sebesar Rp. 55,857,486,754,.00 dan raelisasi pendapatan sebesar Rp. 49,214, 800,279.44. selisi anggaran dan realisasi sebesar Rp. 6,642,686,474.56. dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebesar 88,11%. dapat dikategorikan kurang efektif karena di

bawah 100%. Pada tahun 2016, anggaran pendapatan sebesar Rp. 63,863,375,385.00 dan raelisasi pendapatan sebesar Rp. 56,383,446,988.95. selisi anggaran dan realisasi sebesar Rp. 7,479,928,396.05. dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebesar 88,29%. Dapat dikategorikan kurang efektif karena dibawah 100%. Pada tahun 2017, anggaran pendapatan sebesar Rp. 136,152,091,582.00 dan raelisasi pendapatan sebesar Rp. 100,114,214,718.55. selisi anggaran dan realisasi sebesar Rp. 36,037,876,863.45. dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebesar 73,53%. Dapat dikategorikan tidak efektif karena dibawa 100%. Pada tahun 2018, anggaran pendapatan sebesar Rp. 129,615,126,867.00 dan raelisasi pendapatan sebesar Rp. 66,043,333,304.23. selisi anggaran dan realisasi sebesar Rp. 63,571,793,563. dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebesar 50,95%. Dapat dikategorikan tidak efektif karena dibawa 100%.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Instansi**

Diharapkan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang agar meninjau kembali dan melakukan evaluasi proses penyusunan anggaran setiap periodenya, dan menerapkan pengawasan yang lebih ketat, lebih memperhatikan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu dan semestinya pemerintah melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat mengerti tentang wajib pajak dan sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak. agar apa yang telah ditargetkan dapat tercapai.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai Analisis Anggaran Berbasis Kinerja sebagai Instrumen Pengawasan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi agar lebih akurat sehingga dapat diketahui lebih jelas dampak dari penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- AA. Anwar Prabu Mangkunegara, 2004. Manajemen Sumber Daya Perusahaan, catatan kelima, PT Remaja Rosdakarya Offset Bandung.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Erlangga. Jakarta
- Febrina Astria Veresvera. 2016. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen*, (Online), Vol. 15. No.2 (<http://journal.maranatha.edu/index.php/jmm/article/view/13/13/>. Diakses 5 april 2019)
- Halim Abdul & Khusufi Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Salemba Empat. Jakarta
- Hariandja, Marihot T.E, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta Grasindo.
- Kusnadi. 2003. Masalah, Kerja Sama, Konflik, dan Kinerja. Tanada. Malang.
- Made Pradana Adipura, Nyoman ari Surya Darmawan. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). *e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, (Online), Volume 2 No. 1, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/3390>, diakses 5 april 2019
- Mandang Gabriel Anton 1 Jantje J, Tinangon2 Ingdriani Elim. 2016. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Untuk Mencegah *Akuntabilitas Publik* Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado. Vol.4 No.3, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/14289>. diakses 5 April 2019).
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan, *Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- Mathis, dan Jackson, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama, Catatan Pertama, Yogyakarta: Salemba Empat.
- Muljarijadi, Begdja. 2006. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, *Jurnal Governance (Minergi Masyarakat, Swasta, dan Pemerintah yang berkeadilan)*, Vol. 2.
- Muh.Irvan, Budi Santoso dan Lukman Effendi. 2016. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Asimetri Informasi, Penekanan Anggaran Dan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal akuntansi Dan Investasi*, (Online), Vol. 17 No. 2,

(<https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1434>, diakses 5 april 2019).

Nurafin, 2004; *Penganggaran Perusahaan, edisi Ketiga*. Penerbit Salemba Empat ; Jakarta

Rosjidi. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah. Kerangka, Standard an Metode*. Surabaya: Aksara Satu.

Taufik Kurrohman. 2013. Evaluasi Penganggaran berbasis Kinerja Melalui Kinerja keuangan yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Dinmika Akuntansi*. (Online), Vol.5, No.1, (<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/article/view/2558>, diakses 5 April 2019).







**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013

NO	URAIAN	Reff	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	%	REALISASI 2013
1	<b>PENDAPATAN</b>					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.2.a.1).a)	5,417,500,000.00	6,071,708,609.00	112.08%	3,413,931,005.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.2.a.1).b)	17,927,728,963.00	13,393,457,919.00	74.71%	9,330,797,320.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.2.a.1).c)	2,912,293,695.00	2,912,293,695.00	100.00%	2,770,422,551.00
6	Lain-lain PAD yang sah	5.2.a.1).d)	11,383,636,108.00	12,619,631,221.63	110.86%	5,661,784,255.33

7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>37,641,158,766.00</b>	<b>34,997,091,444.63</b>	<b>92.98%</b>	<b>21,176,935,131.33</b>
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.2.a.2).a) . (1)	18,307,591,411.00	16,743,036,957.00	91.45%	28,530,956,193.00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.2.a.2).a) . (2)	4,156,615,017.00	3,053,317,160.00	73.46%	1,453,738,105.00
12	Dana Alokasi Umum	5.2.a.2).a) . (3)	484,907,285,000.0 0	480,887,270,476.0 0	99.17%	436,542,180,000.0 0
13	Dana Alokasi Khusus	5.2.a.2).a) . (4)	50,131,700,000.00	50,131,700,000.00	100.00%	48,908,340,000.00
14	<b>Jum.Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan</b>		<b>557,503,191,428.0 0</b>	<b>550,815,324,593.0 0</b>	<b>98.80%</b>	<b>515,435,214,298.0 0</b>
15	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>					
16	Dana Otonomi Khusus		0.00	0.00	0.00%	0.00
17	Dana Penyesuaian	5.2.a.2).b)	117,305,580,000.0 0	117,305,580,000.0 0	100.00%	71,115,930,000.00

18	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>		<b>117,305,580,000.00</b>	<b>117,305,580,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>71,115,930,000.00</b>
19	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI-BAGI HASIL PENDAPATAN					
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.2.a.2).c)	23,572,715,378.00	22,551,907,155.18	95.67%	15,126,752,811.82
21	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Daerah		0.00	0.00	0.00%	0.00
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0.00	0.00	0.00%	0.00
23	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi - Bagi Hasil Pendapatan</b>		<b>23,572,715,378.00</b>	<b>22,551,907,155.18</b>	<b>95.67%</b>	<b>15,126,752,811.82</b>
24	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI – LAINNYA					
25	Bantuan Keuangan dari Propinsi		10,838,922,520.00	10,838,922,520.00	0.00%	0.00
26	Bantuan Dana Pemekaran dari Propinsi		0.00	0.00	0.00%	0.00
27	Bantuan Keuangan Lainnya dari Propinsi		0.00	0.00	0.00%	0.00

28	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - Lainnya</b>		<b>10,838,922,520.00</b>	<b>10,838,922,520.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>
29	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		<b>709,220,409,326.00</b>	<b>701,511,734,268.18</b>	<b>98.91%</b>	<b>601,677,897,109.82</b>
30	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
31	Pendapatan Hibah	5.2.a.3).a)	385,448,000.00	606,155,500.00	157.26%	258,181,818.00
32	Pendapatan Dana Darurat		0.00	0.00	0.00%	0.00
33	Pendapatan Lainnya	5.2.a.3).b)	0.00	0.00	0.00%	14,571,380,000.00
34	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah</b>		<b>385,448,000.00</b>	<b>606,155,500.00</b>	<b>157.26%</b>	<b>14,829,561,818.00</b>
35	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>747,247,016,092.00</b>	<b>737,114,981,212.81</b>	<b>98.64%</b>	<b>637,684,394,059.15</b>
36	<b>BELANJA</b>					
37	BELANJA OPERASI					
38	Belanja Pegawai	5.2.b.1).a)	410,703,128,412.00	381,776,757,526.00	92.96%	350,987,127,689.00
39	Belanja Barang dan Jasa	5.2.b.1).b)	152,171,801,508.00	131,945,934,820.00	86.71%	100,009,868,275.00
40	Bunga				0.00%	0.00
41	Subsidi				0.00%	0.00

42	Hibah	5.2.b.1).c)	7,902,094,800.00	7,284,242,800.00	92.18%	15,682,631,477.00
43	Bantuan Sosial	5.2.b.1).d)	4,779,500,000.00	4,138,332,306.00	86.59%	2,308,317,665.00
44	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>575,556,524,720.00</b>	<b>525,145,267,452.00</b>	<b>91.24%</b>	<b>468,987,945,106.00</b>
45	<b>BELANJA MODAL</b>					
46	Belanja Tanah	5.2.b.2).a)	613,281,000.00	100,756,000.00	16.43%	88,328,000.00
47	Belanja Peralatan dan Mesin	5.2.b.2).b)	17,253,465,640.00	16,122,822,340.00	93.45%	19,188,638,130.00
48	Belanja Gedung dan Bangunan	5.2.b.2).c)	40,467,952,910.00	28,742,475,337.00	71.03%	28,962,088,269.00
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.b.2).d)	86,289,312,600.00	69,034,650,780.00	80.00%	54,618,678,754.00
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.2.b.2).e)	220,618,000.00	218,688,000.00	99.13%	644,827,000.00
51	Belanja Aset Lainnya		0.00	0.00	0.00%	0.00
52	<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>144,844,630,150.00</b>	<b>114,219,392,457.00</b>	<b>78.86%</b>	<b>103,502,560,153.00</b>
53	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
54	Belanja Tak Terduga	5.2.b.3)	1,900,000,000.00	1,205,497,250.00	63.45%	1,041,362,900.00
55	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>		<b>1,900,000,000.00</b>	<b>1,205,497,250.00</b>	<b>63.45%</b>	<b>1,041,362,900.00</b>
56	<b>TRANSFER</b>					
57	<b>TRANSFER/BAGI HASIL</b>					

	<b>PENDAPATAN KE DESA</b>					
58	Bagi Hasil Pajak ke Desa		0.00	0.00	0.00%	0.00
59	Bagi Hasil Retribusi ke Desa		0.00	0.00	0.00%	0.00
60	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa		0.00	0.00	0.00%	0.00
61	Bagi Hasil/ Transfer Lainnya	5.2.b.4)	16,195,000,000.00	16,194,980,147.00	100.00%	15,474,687,995.00
62	<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa</b>		<b>16,195,000,000.00</b>	<b>16,194,980,147.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,474,687,995.00</b>
63	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>738,496,154,870.00</b>	<b>656,765,137,306.00</b>	<b>88.93%</b>	<b>589,006,556,154.00</b>
64	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>8,750,861,222.00</b>	<b>80,349,843,906.81</b>	<b>918.19%</b>	<b>48,677,837,905.15</b>
65	<b>PEMBIAYAAN</b>					
66	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
67	Penggunaan SiLPA	5.2.c.1)	25,484,505,088.00	24,851,212,438.27	97.51%	1,728,059,591.12
68	Pencairan Dana Cadangan				0.00%	0.00
69	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00	0.00%	0.00
70	Pinjaman Dalam		0.00	0.00	0.00%	0.00

	Negeri - Pemerintah Pusat					
71	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.2.c.2)	677,157,978.00	75,699,251.00	11.18%	268,836,179.00
72	Penerimaan Piutang Daerah		0.00	0.00	0.00%	0.00
73	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>26,161,663,066.00</b>	<b>24,926,911,689.27</b>	<b>95.28%</b>	<b>1,996,895,770.12</b>
74	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
75	Pembentukan Dana Cadangan		0.00	0.00	0.00%	0.00
76	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0.00	0.00	0.00%	
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0.00	0.00	0.00%	0.00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00	0.00%	0.00
79	Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga	5.2.c.3)	36,474,119,088.00	32,048,474,974.00	87.87%	25,190,228,587.00
80	<b>Jumlah</b>		<b>36,474,119,088.00</b>	<b>32,048,474,974.00</b>	<b>87.87%</b>	<b>25,190,228,587.00</b>

	PengeluaranPemb ayaan					
81	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>(10,312,456,022.00 )</b>	<b>(7,121,563,284.73)</b>	<b>69.06%</b>	<b>(23,193,332,816.88 )</b>
82	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)</b>			<b>73,228,280,622.08</b>	<b>0.00%</b>	<b>25,484,505,088.27</b>



**BUPATI**

**MUSLIMIN BANDO**



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
 UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(dalam rupiah)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Ref	Anggaran 2015	Realisasi 2015	%	Realisasi 2014
1	<b>PENDAPATAN</b>					
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.1.1.1</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1)	7,130,000,000.00	7,340,370,536.00	102.95	6,071,708,609.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2)	19,802,406,960.00	15,557,657,681.00	78.56	13,393,457,919.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3)	5,050,000,000.00	3,387,902,299.67	67.09	2,912,293,695.00
6	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4)	23,875,079,794.00	22,928,869,762.77	96.04	12,619,631,221.00
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)</b>		<b>55,857,486,754.00</b>	<b>49,214,800,279.44</b>	<b>88.11</b>	<b>34,997,091,444.00</b>
8						
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.1.1.2</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	5.1.1.2.1)				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1)(a)	20,838,809,000.00	15,662,422,850.00	75.16	16,743,036,957.00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1)(b)	3,658,065,000.00	2,505,549,234.00	68.49	3,053,317,160.00

13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1)(c)	526,156,287,000.00	526,156,286,000.00	100.00	480,887,270,476.00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1)(d)	172,523,740,000.00	172,525,530,000.00	100.00	50,131,700,000.00
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 + 14)</b>		<b>723,176,901,000.00</b>	<b>716,849,788,084.00</b>	<b>99.13</b>	<b>550,815,324,593.00</b>
16						
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>5.1.1.2.2)</b>				
18	Dana Otonomi Khusus		-	-		-
19	Dana Penyesuaian		127,626,512,000.00	108,703,602,000.00	85.17	117,305,580,000.00
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 + 19)</b>		<b>127,626,512,000.00</b>	<b>108,703,602,000.00</b>	<b>85.17</b>	<b>117,305,580,000.00</b>
21						
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</b>	<b>5.1.1.2.3)</b>				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.1.2.3)a)	24,747,545,251.00	27,551,015,155.02	111.33	22,551,907,155.18
	<b>BANTUAN KEUANGAN - LRA</b>					
24	Pendap. BANTUAN KEUANGAN dari Pemprov Sulsel	5.1.1.2.3)b)	9,488,889,600.00	11,488,889,600.00	121.08	10,838,922,520.00
25	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 + 24)</b>		<b>34,236,434,851.00</b>	<b>39,039,904,755.02</b>	<b>114.03</b>	<b>33,390,829,675.18</b>
27	<b>Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)</b>		<b>885,039,847,851.00</b>	<b>864,593,294,839.02</b>	<b>97.69</b>	<b>701,511,734,268.18</b>
28						
29	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>5.1.1.3</b>				
30	Pendapatan Hibah		5,750,716,000.00	5,659,513,450.00	98.41	606,155,500.00
31	Pendapatan Dana Darurat					

32	Pendapatan Lainnya		-	394,778,079.00		-
33	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (30 s.d 32)</b>		<b>5,750,716,000.00</b>	<b>6,054,291,529.00</b>	105.28	<b>606,155,500.00</b>
34						
35	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 27 + 33)</b>		<b>946,648,050,605.00</b>	<b>919,862,386,647.46</b>	<b>97.17</b>	<b>737,114,981,212.18</b>
36						
37	<b>BELANJA</b>	<b>5.1.2</b>				
38	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.2.1</b>				
39	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1)	447,469,856,173.00	418,177,792,457.00	93.45	381,776,757,526.00
40	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2)	211,644,602,455.00	176,027,294,250.00	83.17	131,945,934,820.00
41	Belanja Bunga					
42	Belanja Subsidi					
43	Belanja Hibah	5.1.2.1.3)	3,137,764,000.00	2,773,000,000.00	88.38	7,284,242,800.00
44	Bantuan Sosial	5.1.2.1.4)	597,500,000.00	79,000,000.00	13.22	4,138,332,306.00
45	Bantuan Keuangan					
46	<b>Jumlah Belanja Operasi (39 s.d 45)</b>		<b>662,849,722,628.00</b>	<b>597,057,086,707.00</b>	<b>90.07</b>	<b>525,145,267,452.00</b>
47						
48	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.2.2</b>				
49	Belanja Tanah	5.1.2.2.1)	1,076,991,500.00	122,119,500.00	11.34	100,756,000.00
50	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2)	28,691,718,275.00	26,322,087,470.00	91.74	16,122,822,340.00
51	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3)	81,083,984,200.00	83,751,401,877.00	103.29	28,742,475,337.00
52	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4)	209,120,797,999.00	147,720,077,088.00	70.64	69,034,650,780.00

53	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5)	4,016,700,000.00	8,480,000.00	0.21	218,688,000.00
54	Belanja Aset Lainnya		-	-		-
55	<b>Jumlah Belanja Modal (49 s.d 54)</b>		<b>323,990,191,974.00</b>	<b>257,924,165,935.00</b>	<b>79.61</b>	<b>114,219,392,457.00</b>
56						
57	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
58	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	750,000,000.00	-	-	1,205,497,250.00
59	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (58)</b>		<b>750,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,205,497,250.00</b>
60						
61	<b>TRANSFER</b>					
62	<b>TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA</b>					
63	Bagi Hasil Pajak ke Desa	5.1.3.2	-	-		-
64	Bagi Hasil Retribusi ke Desa		48,294,815,800.00	48,128,912,255.00	99.66	16,194,980,147.00
65	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa		-	-		-
66	<b>Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa (63 s.d 65)</b>		<b>48,294,815,800.00</b>	<b>48,128,912,255.00</b>	<b>99.66</b>	<b>16,194,980,147.00</b>
67						
68	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (46 + 55 + 59 + 66)</b>		<b>1,035,884,730,402.00</b>	<b>903,110,164,897.00</b>	<b>87.18</b>	<b>656,765,137,306.00</b>
69						
70	<b>SURPLUS/DEFISIT ( 35- 68)</b>		<b>(89,236,679,797.00)</b>	<b>16,752,221,750.46</b>	<b>(18.77)</b>	<b>80,349,843,906.18</b>
71						
72	<b>PEMBIAYAAN</b>					
73	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.4.1</b>				

74	Penggunaan SiLPA		74,376,015,716.00	72,342,856,917.08	97.27	24,851,212,438.27
75	Pencairan Dana Cadangan		-	-		-
76	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-		-
77	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-		-
78	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		-
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		25,000,000,000.00	-	-	75,699,251.00
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-		-
81	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-		-
82	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-		-
83	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-		-
84	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		662,460,055.00	41,202,933.00	6.22	-
85	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		-
86	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan (74 s.d 85)</b>		<b>100,038,475,771.00</b>	<b>72,384,059,850.08</b>	<b>72.36</b>	<b>24,926,911,689.27</b>
87						
88	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.4.2</b>				
89	Pembentukan Dana Cadangan					
90	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	100.00	-
91	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-		-
92	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman		-	-		-

	Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya					
93	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank					
94	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-		-
95	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-		-
96	Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga		801,795,974.00	-	-	32,048,474,974.00
97	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-		-
98	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-		-
99	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		-
100	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (89 s.d 99)</b>		<b>10,801,795,974.00</b>	<b>10,000,000,000.00</b>	<b>92.58</b>	<b>32,048,474,974.00</b>
101	<b>PEMBIAYAAN NETTO (86 - 100)</b>		<b>89,236,679,797.00</b>	<b>62,384,059,850.08</b>	<b>69.91</b>	<b>(7,121,563,284.73)</b>
102						
103	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (70 + 101)</b>	<b>5.1.5</b>	-	<b>79,136,281,600.54</b>		<b>73,228,280,621.45</b>

ENREKANG,

**BUPATI ENREKANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015  
 (SEBELUM AUDIT)

*(dalam rupiah)*

No.	URAIAN	Reff	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	<b>PENDAPATAN</b>					
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	7.5.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.a	7,737,000,000.00	9,147,403,707.00	118.23	7,340,370,536.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.b	22,609,497,500.00	19,878,129,053.00	87.92	15,557,657,681.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.c	4,801,158,746.00	4,826,158,746.00	100.52	3,387,902,299.67
6	Lain-lain PAD yang Sah	7.5.1.1.d	28,715,719,139.00	22,531,755,482.95	78.46	22,928,869,762.77
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>63,863,375,385.00</b>	<b>56,383,446,988.95</b>	<b>88.29</b>	<b>49,214,800,279.44</b>
8						
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	7.5.1.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	7.5.1.2.1				

11	Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.1.2.1.a	14,863,804,000.00	16,948,689,099.00	114.03	15,662,422,850.00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.5.1.2.1.b	5,452,163,000.00	7,846,379,393.00	143.91	2,505,549,234.00
13	Dana Alokasi Umum	7.5.1.2.1.c	543,890,364,000.00	543,890,364,000.00	100.00	526,156,286,000.00
14	Dana Alokasi Khusus	7.5.1.2.1.d	334,521,984,200.00	264,434,758,356.00	79.05	172,525,530,000.00
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>		<b>898,728,315,200.00</b>	<b>833,120,190,848.00</b>	<b>92.70</b>	<b>716,849,788,084.00</b>
16						
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	7.5.1.2.2				
18	Dana Otonomi Khusus		0.00	0.00	0.00	0.00
19	Dana Penyesuaian	7.5.1.2.2.a	103,327,631,000.00	103,327,631,000.00	100.00	108,703,602,000.00
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya</b>		<b>103,327,631,000.00</b>	<b>103,327,631,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>108,703,602,000.00</b>
21						
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	7.5.1.2.3				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.5.1.2.3.a	27,214,361,296.00	31,381,322,861.50	115.31	27,551,015,155.02
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
25	Pendapatan Bantuan Keuangan	7.5.1.2.3.b	8,004,012,827.00	7,320,710,427.00	91.46	11,488,889,600.00
26	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>		<b>35,218,374,123.00</b>	<b>38,702,033,288.50</b>	<b>109.89</b>	<b>39,039,904,755.02</b>
27	<b>Total Pendapatan Transfer</b>		<b>1,037,274,320,323.00</b>	<b>975,149,855,136.50</b>	<b>94.01</b>	<b>864,593,294,839.02</b>
28						
29	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	7.5.1.3				
30	Pendapatan Hibah	7.5.1.3.a	2,849,022,542.00	1,282,142,542.00	45.00	5,659,513,450.00
31	Pendapatan Dana Darurat		0.00	0.00	0.00	0.00
32	Pendapatan Lainnya	7.5.1.3.b	0.00	1,185,000.00	0.00	394,778,079.00

33	<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah</b>		<b>2,849,022,542.00</b>	<b>1,283,327,542.00</b>	<b>45.04</b>	<b>6,054,291,529.00</b>
34	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1,103,986,718,250.00</b>	<b>1,032,816,629,667.45</b>	<b>93.55</b>	<b>919,862,386,647.46</b>
35						
36	<b>BELANJA</b>					
37	<b>BELANJA OPERASI</b>	7.5.1.4				
38	Belanja Pegawai	7.5.1.4.a	451,479,857,499.00	426,236,939,323.00	94.41	418,177,792,457.00
39	Belanja Barang	7.5.1.4.b	227,983,829,038.00	213,139,899,544.00	93.49	176,027,294,250.00
40	Bunga		0.00	0.00	0.00	0.00
41	Subsidi		0.00	0.00	0.00	0.00
42	Hibah	7.5.1.4.c	27,076,434,600.00	26,085,035,720.00	96.34	2,763,000,000.00
43	Bantuan Sosial	7.5.1.4.d	500,000,000.00	47,000,000.00	9.40	89,000,000.00
44	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>707,040,121,137.00</b>	<b>665,508,874,587.00</b>	<b>94.13</b>	<b>597,057,086,707.00</b>
45						
46	<b>BELANJA MODAL</b>	7.5.1.5				
47	Belanja Tanah	7.5.1.5.a	764,000,000.00	641,500,000.00	83.97	122,119,500.00
48	Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.1.5.b	42,748,348,216.00	36,801,643,846.00	86.09	26,322,087,470.00
49	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.1.5.c	64,771,265,472.00	48,386,453,802.00	74.70	83,751,401,877.00
50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.5.d	294,040,820,636.00	243,778,683,369.00	82.91	147,720,077,088.00
51	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.5.e	343,418,000.00	297,036,500.00	86.49	8,480,000.00
52	Belanja Aset Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
53	<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>402,667,852,324.00</b>	<b>329,905,317,517.00</b>	<b>81.93</b>	<b>257,924,165,935.00</b>
54						
55	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	7.5.1.6				
56	Belanja Tak Terduga	7.5.1.6	750,000,000.00	227,700,000.00	30.36	0.00

57	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>		<b>750,000,000.00</b>	<b>227,700,000.00</b>	<b>30.36</b>	<b>0.00</b>
58	<b>Jumlah Belanja</b>		<b>1,110,457,973,461.00</b>	<b>995,641,892,104.00</b>	<b>89.66</b>	<b>854,981,252,642.00</b>
59						
60	<b>TRANSFER</b>	7.5.1.7				
61	<b>TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>	7.5.1.7.1				
62	Bagi Hasil Pajak		0.00	0.00	0.00	0.00
63	Bagi Hasil Retribusi		0.00	0.00	0.00	0.00
64	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
65	<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
66						
67	<b>TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN</b>	7.5.1.7.2				
68	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.1.7.2.a	94,882,849,000.00	94,879,163,447.00	99.99	48,128,912,255.00
69	Bantuan Keuangan lainnya	7.5.1.7.2.b	814,456,265.00	814,456,265.00	100.00	
70						
71	<b>Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan</b>		<b>95,697,305,265.00</b>	<b>95,693,619,712.00</b>	<b>100.00</b>	<b>48,128,912,255.00</b>
72	<b>Jumlah Transfer</b>		<b>95,697,305,265.00</b>	<b>95,693,619,712.00</b>	<b>100.00</b>	<b>48,128,912,255.00</b>
73	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>1,206,155,278,726.00</b>	<b>1,091,335,511,816.00</b>	<b>90.48</b>	<b>903,110,164,897.00</b>
74						
75	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>(102,168,560,476.00)</b>	<b>(58,518,882,148.55)</b>	<b>57.28</b>	<b>16,752,221,750.46</b>
76						
77	<b>PEMBIAYAAN</b>	7.5.1.8				
78						
79	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	7.5.1.8.1				
80	Penggunaan SiLPA	7.5.1.8.1.a	79,566,060,862.00	75,981,714,116.54	95.50	72,342,856,917.08

81	Pencairan Dana Cadangan		0.00	0.00	0.00	0.00
82	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00	0.00	0.00
83	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0.00	0.00	0.00	0.00
84	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
85	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		34,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00
86	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0.00	0.00	0.00	0.00
87	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0.00	0.00	0.00	0.00
88	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
89	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0.00	0.00	0.00	0.00
90	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
91	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	7.5.1.8.1.b	750,000,000.00	41,868,555.00	5.58	41,202,933.00
92	<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>114,316,060,862.00</b>	<b>76,023,582,671.54</b>	<b>66.50</b>	<b>72,384,059,850.08</b>
93						
94	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	7.5.1.8.2				
95	Pembentukan Dana Cadangan		0.00	0.00	0.00	0.00
96	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	7.5.1.8.2.a	11,282,142,542.00	11,282,142,542.00	100.00	10,000,000,000.00
97	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0.00	0.00	0.00	0.00

98	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
99	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0.00	0.00	0.00	0.00
100	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0.00	0.00	0.00	0.00
101	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0.00	0.00	0.00	0.00
102	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
103	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0.00	0.00	0.00	0.00
104	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
105	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		865,357,844.00	0.00	0.00	
106	<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>12,147,500,386.00</b>	<b>11,282,142,542.00</b>	<b>92.88</b>	<b>10,000,000,000.00</b>
107	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>		<b>102,168,560,476.00</b>	<b>64,741,440,129.54</b>	<b>63.37</b>	<b>62,384,059,850.08</b>
108						
109	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	7.5.1.9		<b>6,222,557,980.99</b>		<b>79,136,281,600.54</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
 Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016  
 (SEBELUM AUDIT)

*(dalam rupiah)*

No.	URAIAN	Reff	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	<b>PENDAPATAN</b>					
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	7.5.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.a	9,965,000,000.00	9,023,051,580.00	90.55	9,147,403,707.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.b	30,165,130,944.00	25,358,968,848.00	84.07	19,878,129,053.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.c	12,600,000,000.00	12,355,808,162.48	98.06	4,826,158,746.00
6	Lain-lain PAD yang Sah	7.5.1.1.d	83,421,960,638.00	53,376,386,128.07	63.98	22,531,755,482.95
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>136,152,091,582.00</b>	<b>100,114,214,718.55</b>	<b>73.53</b>	<b>56,383,446,988.95</b>
8						
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	7.5.1.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	7.5.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.1.2.1.a	17,628,988,184.00	13,136,161,539.00	74.51	16,948,689,099.00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya	7.5.1.2.1.b	6,440,104,421.00	3,797,817,438.00	58.97	7,846,379,393.00

	Alam					
13	Dana Alokasi Umum	7.5.1.2.1.c	534,335,959,000.00	534,335,959,000.00	100.00	543,890,364,000.00
14	Dana Alokasi Khusus	7.5.1.2.1.d	229,688,040,000.00	213,747,024,586.00	93.06	264,434,758,356.00
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>		<b>788,093,091,605.00</b>	<b>765,016,962,563.00</b>	<b>97.07</b>	<b>833,120,190,848.00</b>
16						
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA</b>	7.5.1.2.2				
18	Dana Otonomi Khusus		0.00	0.00	0.00	0.00
19	Dana Penyesuaian	7.5.1.2.2.a	89,128,443,000.00	89,128,442,000.00	100.00	103,327,631,000.00
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pusat – Lainnya</b>		<b>89,128,443,000.00</b>	<b>89,128,442,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>103,327,631,000.00</b>
21						
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	7.5.1.2.3				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.5.1.2.3.a	32,874,681,408.00	36,068,762,539.00	109.72	31,381,322,861.50
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		5,134,490,600.00	3,997,912,000.00	0.00	7,320,710,427.00
25	Pendapatan Bantuan Keuangan	7.5.1.2.3.b	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
26	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>		<b>38,009,172,008.00</b>	<b>40,066,674,539.00</b>	<b>105.41</b>	<b>38,702,033,288.50</b>
27	<b>Total Pendapatan Transfer</b>		<b>915,230,706,613.00</b>	<b>894,212,079,102.00</b>	<b>97.70</b>	<b>975,149,855,136.50</b>
28						
29	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	7.5.1.3				
30	Pendapatan Hibah	7.5.1.3.a	6,336,630,000.00	6,527,246,258.00	103.01	1,282,142,542.00
31	Pendapatan Dana Darurat		0.00	0.00	0.00	0.00
32	Pendapatan Lainnya	7.5.1.3.b	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00
33	<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah</b>		<b>6,336,630,000.00</b>	<b>6,527,246,258.00</b>	<b>103.01</b>	<b>1,283,327,542.00</b>
34	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1,057,719,428,195.00</b>	<b>1,000,853,540,078.55</b>	<b>94.62</b>	<b>1,032,816,629,667.45</b>

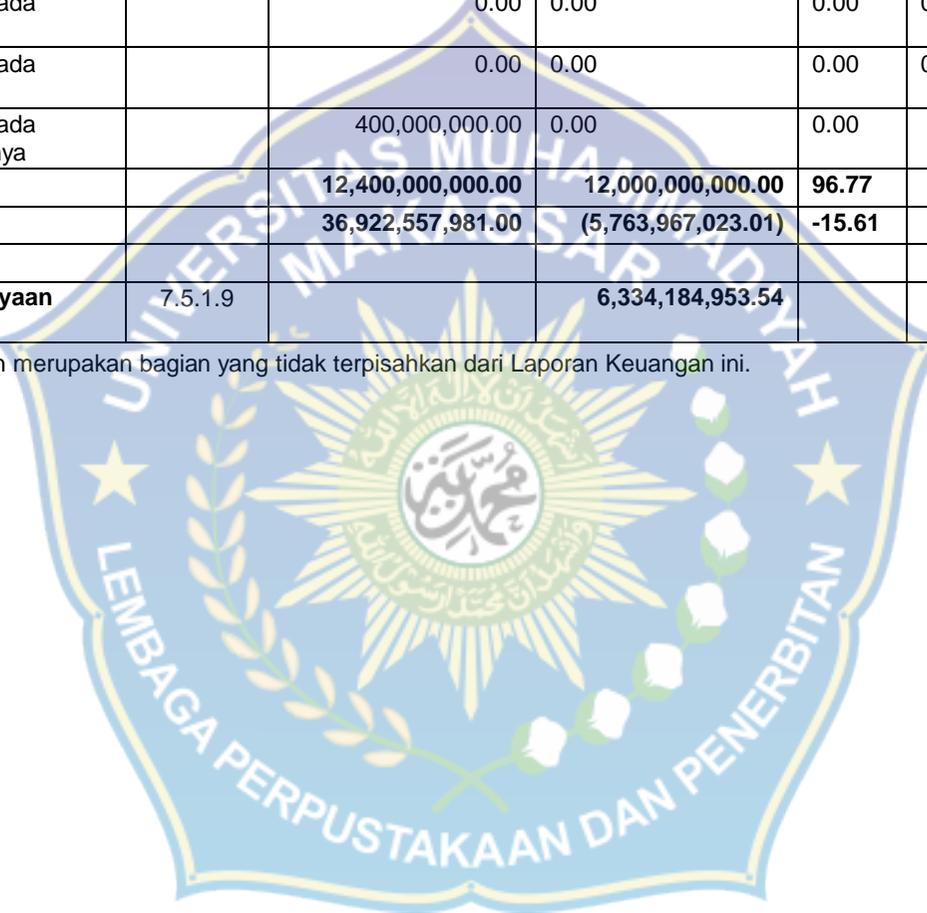
35						
36	<b>BELANJA</b>					
37	<b>BELANJA OPERASI</b>	7.5.1.4				
38	Belanja Pegawai	7.5.1.4.a	391,499,847,204.00	369,600,973,631.00	94.41	426,236,939,323.00
39	Belanja Barang	7.5.1.4.b	276,627,152,938.00	266,957,030,483.00	96.50	213,139,899,544.00
					96.50	
40	Bunga		0.00	0.00	0.00	0.00
41	Subsidi		928,656,000.00	0.00	0.00	0.00
42	Hibah	7.5.1.4.c	37,707,674,316.00	31,716,827,325.00	84.11	26,085,035,720.00
43	Bantuan Sosial	7.5.1.4.d	745,000,000.00	206,500,000.00	27.72	47,000,000.00
44	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>707,508,330,458.00</b>	<b>668,481,331,439.00</b>	<b>94.48</b>	<b>665,508,874,587.00</b>
45						
46	<b>BELANJA MODAL</b>	7.5.1.5				
47	Belanja Tanah	7.5.1.5.a	780,000,000.00	548,080,000.00	70.27	641,500,000.00
48	Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.1.5.b	31,540,250,748.00	28,871,268,774.00	91.54	36,801,643,846.00
49	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.1.5.c	63,212,601,453.00	44,110,599,986.00	69.78	48,386,453,802.00
50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.5.d	143,653,270,117.00	126,522,778,285.00	88.08	243,778,683,369.00
51	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.5.e	35,750,000.00	35,750,000.00	100.00	297,036,500.00
52	Belanja Aset Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
53	<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>239,221,872,318.00</b>	<b>200,088,477,045.00</b>	<b>83.64</b>	<b>329,905,317,517.00</b>
54						
55	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	7.5.1.6				
56	Belanja Tak Terduga	7.5.1.6	250,000,000.00	70,050,000.00	28.02	227,700,000.00
57	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>		<b>250,000,000.00</b>	<b>70,050,000.00</b>	<b>28.02</b>	<b>227,700,000.00</b>
58	<b>Jumlah Belanja</b>		<b>946,980,202,776.00</b>	<b>868,639,858,484.00</b>	<b>91.73</b>	<b>995,641,892,104.00</b>
59						
60	<b>TRANSFER</b>	7.5.1.7				

61	<b>TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>	7.5.1.7.1				
62	Bagi Hasil Pajak		0.00	0.00	0.00	0.00
63	Bagi Hasil Retribusi		0.00	0.00	0.00	0.00
64	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
65	<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
66						
67	<b>TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN</b>	7.5.1.7.2				
68	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.1.7.2.a	0.00	0.00	99.99	94,879,163,447.00
69	Bantuan Keuangan ke Desa	7.5.1.7.2.b	147,013,230,600.00	119,466,976,818.00	81.26	0.00
70	Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.1.7.2.c	648,552,800.00	648,552,800.00	100.00	814,456,265.00
71	<b>Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan</b>		<b>147,661,783,400.00</b>	<b>120,115,529,618.00</b>	<b>81.35</b>	<b>95,693,619,712.00</b>
72	<b>Jumlah Transfer</b>		<b>147,661,783,400.00</b>	<b>120,115,529,618.00</b>	<b>81.35</b>	<b>95,693,619,712.00</b>
73	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>1,094,641,986,176.00</b>	<b>988,755,388,102.00</b>	<b>90.33</b>	<b>1,091,335,511,816.00</b>
74						
75	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>(36,922,557,981.00)</b>	<b>12,098,151,976.55</b>	<b>(32.77)</b>	<b>(58,518,882,148.55)</b>
76						
77	<b>PEMBIAYAAN</b>	7.5.1.8				
78						
79	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	7.5.1.8.1				
80	Penggunaan SilPA	7.5.1.8.1.a	6,222,557,981.00	6,221,468,702.99	99.98	75,981,714,116.54
81	Pencairan Dana Cadangan		0.00	0.00	0.00	0.00
82	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00	0.00	0.00
83	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0.00	0.00	0.00	0.00

84	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
85	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		43,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00
86	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0.00	0.00	0.00	0.00
87	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0.00	0.00	0.00	0.00
88	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
89	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0.00	0.00	0.00	0.00
90	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
91	Penerimaan Kembali Pinjaman angsuran Berjangka	7.5.1.8.1.b	100,000,000.00	14,564,274.00	14.56	41,868,555.00
92	<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>49,322,557,981.00</b>	<b>6,236,032,976.99</b>	<b>12.64</b>	<b>76,023,582,671.54</b>
93						
94	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	7.5.1.8.2				
95	Pembentukan Dana Cadangan		0.00	0.00	0.00	0.00
96	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	7.5.1.8.2.a	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	100.00	11,282,142,542.00
97	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0.00	0.00	0.00	0.00
98	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
99	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0.00	0.00	0.00	0.00
100	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0.00	0.00	0.00	0.00
101	Pembayaran Pokok Pinjaman		0.00	0.00	0.00	0.00

	Dalam Negeri – Obligasi					
102	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
103	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0.00	0.00	0.00	0.00
104	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
105	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		400,000,000.00	0.00	0.00	
106	<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>12,400,000,000.00</b>	<b>12,000,000,000.00</b>	<b>96.77</b>	<b>11,282,142,542.00</b>
107	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>		<b>36,922,557,981.00</b>	<b>(5,763,967,023.01)</b>	<b>-15.61</b>	<b>64,741,440,129.54</b>
108						
109	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	7.5.1.9		<b>6,334,184,953.54</b>		<b>6,222,557,980.99</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



## Dokumentasi Kegiatan





## BIOGRAFI PENULIS



Sriwahyuni B. Lahir di Buntu Lamba pada tanggal 25 Agustus 1997 dari pasangan suami istri Bapak Basri dan Ibu Warni. Peneliti adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di jalan Sultan Alauddin 2.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SDK Bala-batu lulus tahun 2009, MTS Guppi Buntu Barana lulus tahun 2012, MA Guppi Buntu Barana lulus tahun 2015, dan mulai tahun 2015 mengikuti program S1 Manajemen kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswi program S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.



